



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/119 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/010
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/010 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/010 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/010 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/010 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/119 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/010/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
1	Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM	- Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	NIP.19681124 199310 2 001		1.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kepala Dinas		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	NURUL HUSNA LISTYATI, SE	- Bendahara Pengeluaran	1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan
	NIP.19720811 199703 2 006		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Staf Bagian Keuangan		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			1.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			1.07 Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2. Pemeliharaan Mebel
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	Dra. SRI DEWI INDRAJATI, MM	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	NIP.19670128 198603 2 002	Pejabat Kuasa Pengguna Barang	1.01 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi
	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
	Perlindungan Perempuan		2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

4	SUSIANTI, SE NIP. 19710226 199311 2 002	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.02 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
	Staf Bagian Keuangan		1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi
			2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi
			03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			1.01 Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi.
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
			1.02 Kegiatan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/Kota
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
			1.03 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
			3. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
			04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			1.01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
			1. Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/Kota

5	FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.SI	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	NIP. 19710919 200312 2 004	Pejabat Kuasa Pengguna Barang	1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat		1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
			03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
			1. Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	JOSEPH GINANTO	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	NIP. 19811229 201001 1 004		1.02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	Staf Bagian Keuangan		1. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi
			05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			1.01 Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Provinsi.
			1. Penyediaan data gender dan anak provinsi
			06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			1.02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
			1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
			2. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

			02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
			1.02 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Provinsi
			1. Penyusunan Profil kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
			04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			1. Peningkatan kapasitas mitra dan ormas dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui BKB,BKR,BKL, UPPKS dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga
7	SAPTIWI MUMPUNI, SE, M.Si	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/	06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	19640929 198609 2 001	Pejabat Kuasa Pengguna Barang	1.01 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
	Bidang pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Anak		1. Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan provinsi
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
8	WIWIK SUMARYANI, A.Md	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	NIP. 19830416 201101 2 009		1.01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Staf Subbag Keuangan		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.
			1.02 Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
			1. Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
			3. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

			1.03 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.
			04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			1.03 Kegiatan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
9	Drs. YULI ARSIANTO, MM	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	NIP.19680702 199803 1 004 Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi,	Pejabat Kuasa Pengguna Barang	1.01 Pengembangan desain program pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan Budaya Lokal
	Informasi dan Edukasi		1. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui Mitra Kerja
			2. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
10	YULAEKHA, SE	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	NIP. 19721222 200501 2 009		1. Peningkatan peran serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Staf Bagian Keuangan		
11	Dra. BUDI DAYANTI, M.Si	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	NIP.19661222 199303 2 004		1.01 Kegiatan Pematuan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera		1. Penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

			2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi.
			3. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat.
12	ERNI KUSMAWATI,A.Md NIP.19760218 201101 2 003	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Staf Bagian Keuangan		1.01 Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui
			1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
			1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			1. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO